

**PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM  
PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU DI KELURAHAN  
PEDURUNGAN KIDUL KOTA SEMARANG**

Fitri Febrina Anggraini, Titik Djumiarti, S.Sos, M.Si

**Departemen Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**Abstrak**

Pengelolaan sampah terpadu di Kelurahan Pedurungan Kidul merupakan kegiatan proses pemberdayaan masyarakat dalam upaya membuat pengelolaan sampah berjalan dengan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu di Kelurahan Pedurungan Kidul Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknis analisis taksonomi. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu di Kelurahan Pedurungan Kidul Kota Semarang melalui 3 proses yang harus dilakukan diantaranya yaitu Penyadaran, Pengkapasitasan dan Pendayaan. Tahap Penyadaran yaitu dengan melakukan motivasi. Dimana kegiatan motivasi dalam kegiatan penyadaran dilakukan dengan cara mensosialisasikan, musyawarah dan pembinaan pentingnya mengelola sampah yang dapat bernilai jual. Kemudian tahapan pengkapasitasan dilakukan melalui cara pembimbingan. Kegiatan pembimbingan dilakukan melalui pelatihan pemanfaatan pengolahan sampah organik dan anorganik. Kemudian proses terakhir dalam pemberdayaan yang dilakukan yaitu Pendayaan, dimana pemberian pendayaan dilakukan melalui fasilitator dengan memberikan bantuan sumberdaya untuk berpartisipasi aktif dalam pembuatan kerajinan tangan olahan sampah anorganik dan organik. Namun dalam proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu di Kelurahan Pedurungan Kidul Kota Semarang masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu dalam proses penyadaran dan pengkapasitasan, dimana kendala dalam proses penyadaran yaitu kurangnya sosialisasi mengenai sadar hidup bersih dan sehat. Kemudian kendala dalam tahap pengkapasitasan yaitu kurangnya berperannya Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan pelatihan dalam pengelolaan sampah. Adapun saran yang dapat diberikan adalah meningkatkan sosialisasi mengenai sadar hidup bersih dan sehat dalam perilaku buang sampah dan pengelolaan limbah dan pemerintah daerah diharapkan lebih meningkatkan perannya dan berkoordinasi dengan stakeholder lain

**Kata Kunci : Pemberdayaan, Peran Stakeholder, Pengelolaan Sampah.**

# **THE PROCESS OF COMMUNITY EMPOWERMENT IN INTEGRATED WASTE MANAGEMENT IN THE PEDURUNGAN KIDUL VILLAGE SEMARANG CITY**

Fitri Febrina Anggraini, Titik Djumiarti, S.Sos, M.Si

**Departemen Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRACT**

Integrated waste management in Pedurungan Kidul Village is an activity of community empowerment process in an effort to make waste management run optimally. This study aims to identify and analyze the process of community empowerment in integrated waste management in the Pedurungan Kidul Village, Semarang City. The research method used is a qualitative approach with technical taxonomic analysis. The data collection techniques are by observation, interview and documentation. The results showed that the process of community empowerment in integrated waste management in the Pedurungan Kidul Kelurahan of Semarang City through 3 processes that must be carried out include Awareness, Capacitance and Empowerment. Awareness Stage is by doing motivation. Where motivation activities in awareness activities are carried out by way of socializing, deliberation and coaching the importance of managing waste that can be of sale value. Then the capacity building step is done through mentoring. Guidance activities are carried out through training in utilization of organic and inorganic waste processing. Then the final process in empowerment is done by Enrichment, where the empowerment is done through a facilitator by providing resource assistance to actively participate in making handicrafts processed inorganic and organic waste. However, in the process of community empowerment in integrated waste management in the Semarang City Pedurungan Kidul Village there are still obstacles encountered in the process of awareness and capacity building, where the constraint in the awareness process is the lack of socialization regarding awareness of clean and healthy living. Then the obstacle in the capacity building stage is the lack of role of the Department of the Environment in providing training in waste management. The advice that can be given is to increase awareness about clean and healthy living awareness in waste disposal behavior and waste management and the local government is expected to further enhance its role and coordinate with other stakeholders.

Keywords: Empowerment, Role of Stakeholders, Waste Management.

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Di era modernisasi saat ini pembangunan merupakan hal yang tidak dapat dihindari, dimana kota – kota besar sedang saling berlomba – lomba untuk melakukan pembangunan, termasuk juga pembangunan yang dilakukan di Kota Semarang. Berbagai fakta mengenai pembangunan menunjukkan bahwa kualitas lingkungan sebagai akibat dari adanya pembangunan dari tahun ke tahun mengalami penurunan, juga timbul permasalahan lingkungan hidup yang kompleks terutama dalam menangani masalah sampah. Tingginya produksi sampah di Kota Semarang berdampak pada beban TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan ini perlu penanganan yang serius dari Pemerintah Kota Semarang agar masalah sampah bisa teratasi. Pertambahan jumlah penduduk diperkotaan yang pesat berdampak terhadap peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Peningkatan jumlah sampah yang tidak diikuti oleh perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana

pengelolaan sampah akan mengakibatkan permasalahan sampah menjadi kompleks antara lain : sampah yang tidak terangkut dan mengakibatkan pembakaran atau pembuangan sampah liar sehingga akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan di sekitarnya. Tingginya produksi sampah di Kota Semarang berdampak pada beban TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan ini perlu penanganan yang serius dari Pemkot Semarang agar masalah sampah bisa teratasi. Guna mengantisipasi hal tersebut maka Pemerintah Kota Semarang melalui DLH Kota Semarang menerapkan sistem pengelolaan sampah terpadu sebagai bentuk fasilitas pengolahan sampah berkelanjutan yaitu Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang sesuai dengan Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah yang berada di wilayah kecamatan. Pengelolaan sampah yang benar dan efektif tersebut tak terlepas dari adanya sumber daya manusia yang bersangkutan dalam arti dengan sumber daya manusia

yang rendah sudah barang tentu akan membawa dampak negatif yaitu adanya ketidakpedulian masyarakat terhadap masalah sampah. Adapun kelompok swadaya masyarakat yang membentuk suatu wadah dengan tujuan pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah bank sampah yang berada di Kelurahan Pedurungan Kidul Semarang dimana bank sampah merupakan bentuk komunitas yang berfungsi sebagai lokasi induk untuk mengumpulkan sampah dan kemudian dijual pada pengepul. Alasan didirikan bank sampah tersebut adalah karena jumlah volume sampah yang terus meningkat dan pemetaan sampah yang masih semrawut. Dengan alasan tersebut maka ada beberapa warga mempunyai gagasan mendirikan bank sampah tersebut.

Pada dasarnya bank sampah yang dikelola anggota masyarakat tersebut sebagai bentuk adanya keprihatinan salah satu anggota masyarakat akan lingkungan hidup yang semakin lama semakin dipenuhi dengan sampah baik organik maupun anorganik.

Sampah yang semakin banyak tentu akan menimbulkan banyak masalah, sehingga memerlukan pengolahan seperti membuat sampah menjadi bahan yang berguna. Pengelolaan sampah dengan sistem bank sampah ini diharapkan mampu membentuk pemerintah dalam menangani sampah dan meningkatkan ekonomi masyarakat

Namun demikian bank sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul Semarang dalam pelaksanaan tersebut masih mengalami beberapa kendala antara lain :

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu, dimana masyarakat kurang paham dalam pengelolaan sampah tersebut.
2. Usaha pemberdayaan masyarakat mengenai sampah terpadu kurang berkembang, dimana masyarakat kurang partisipasinya dalam pengelolaan yang baik.

3. Kurang adanya sosialisasi tentang penerapan sampah terpadu, dimana aparat Kelurahan kurang memberikan pengarahan pada masyarakat sehingga masyarakat kurang paham.
4. Motivasi masyarakat kurang dan harus ada daya tarik dari pengelolaan sampah terpadu, dimana masyarakat harus diberi bukti nyata bahwa dengan adanya pemilahan sampah yang benar nantinya dapat menjadi nilai jual tanpa ada daya tarik tersebut masyarakat kurang termotivasi.
5. Masyarakat kurang memahami mekanisme pengelolaan sampah karena masyarakat masih menggunakan cara – cara tradisional dimana sampah tidak dipilah tapi dijadikan satu, padahal pengelolaan sampah yang bagus menggunakan sistim 3R.

Berdasarkan permasalahan yang ada, dibutuhkan integritas dari semua unsur guna menyukseskan pemberdayaan dalam pengelolaan sampah terpadu di Kelurahan Pedurungan Kidul Kota Semarang. Permasalahan yang ada tidaklah dapat selesai jika terdapat unsur yang pasif dalam pemberdayaan dalam upaya pengelolaan sampah terpadu. Permasalahan yang telah diuraikan menimbulkan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Proses Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu di Kelurahan Pedurungan Kidul Kota Semarang”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana Proses Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu di Kelurahan Pedurungan Kidul Kota Semarang?

## **C. TUJUAN**

Mengidentifikasi dan menganalisis proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu di Kelurahan Pedurungan Kidul Kota Semarang.

## **D. KAJIAN TEORI**

### **1. Administrasi Publik**

Chandler & Plano (2014:3) dalam Keban, mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir, dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler & Plano juga menjelaskan bahwa administrasi publik adalah seni dan ilmu (arti and science) yang ditujukan untuk mengatur “public affairs” dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Marshall E, Dimock, Gladys O. Dimock dan Lous W. Koenig (1960) mengatakan bahwa administrasi publik adalah kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus (2006:23-24) dalam Inu Kencana Syafie mendefinisikan administrasi publik adalah (1) meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-

badan perwakilan politik, (2) koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah. (3) suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahannya dan kecakapan dan teknik-teknik yang tak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud dari usaha sejumlah orang.

Paradigma Administrasi Publik Nicholas Henry (1995:21-49) mengungkapkan bahwa standard suatu disiplin ilmu seperti yang diungkapkan oleh Robert T. Golembiewski dimana mencakup fokus (metode atau cara ilmiah apa yang digunakan dalam pemecahan masalah) dan locus (medan atau tempat dimana metode tersebut digunakan atau diterapkan) yang antara lain sebagai berikut : Paradigma 1 (1900-1926) dikenal sebagai paradigma Dikontomi Politik dan Administrasi, Paradigma 2 (1927-1937) disebut sebagai paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi, Paradigma 3 (1950-

1970) adalah paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik, Paradigma 4 (1956-1970) adalah Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi, Paradigma 5 (1970-sekarang) adalah Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik, dan Paradigma 6 (1990-sekarang) adalah Governance. Paradigma Administrasi Publik dalam penelitian ini sangat berkaitan dengan apa yang akan dibahas, karena sinergitas stakeholders dalam penelitian ini merupakan bagian dari good governance. Good governance sendiri terdapat dalam paradigma NPM yang didalamnya terdapat prinsip pemberdayaan

## **2. Manajemen Publik**

J. Steven Ott, Albert C. Hyde dan Jay M. Shafritz dalam Harbani Pasolong (2013:83), memberikan pendapat bahwa dalam tahun 1990-an manajemen publik mengalami masa transisi dengan beberapa isu yang sangat menantang, yaitu : (1) privatisasi sebagai suatu alternatif bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, (2) rasionalitas

dan akuntabilitas, (3) perencanaan dan control, (4) keuangan dan penganggaran, dan (5) produktivitas sumber daya manusia. Isu-isu ini sangat menantang sekolah maupun perguruan tinggi yang mengajarkan tentang manajemen publik untuk terus meningkatkan kualitas mengajarnya demi mewujudkan manajer publik yang professional.

## **3. Pembangunan Berbasis Masyarakat**

Konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community-based development). Sesuai dengan konsepnya pembangunan yang berpusat pada rakyat, maka pendekatan yang digunakan lebih memberi tempat pada aspek manusia, sehingga lebih bersifat humanistik. Salah satu yang terpenting agar terwujudnya pembangunan berbasis masyarakat adalah menempatkan masyarakat lebih dari subyek, sebagai aktor

yang dari pembangunan. Konsep pembangunan berbasis masyarakat ini sebenarnya merupakan suatu bentuk perencanaan sosial dengan tujuan melakukan perubahan sosial yang terencana yaitu perubahan sikap dan perilaku sosial masyarakat agar menjadi berdaya atau mampu melakukan pembangunan dilingkungannya dengan usaha sendiri secara kolektif. Karakteristik utama konsep pembangunan berbasis masyarakat adalah sebagai berikut (dalam Sholeh, 2014) :

1. Penekanan pada lokalitas baik dalam pengertian kelembagaan, komunitas, lingkungan maupun kultur.
2. Berimplikasi pada transformatif and transactive planning, bottom up, community empowerment and participative.

#### **4. Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Mardikanto (2003:100) Pemberdayaan masyarakat adalah proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan

masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada di semua stakeholder (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan. Menurut Sumaryadi (2005: 111), pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan sosial berkelanjutan. Teori mengenai tahap pemberdayaan yang lain yakni tiga tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat diungkapkan oleh Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto (Wrihatnolo : 2007) sebagai berikut :

Adapun Tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat diungkapkan oleh Randy R



Wrihatnolo dan Riant Nugroho  
Dwidjowijoto (2007:101) sebagai  
berikut :

1. Tahap Penyadaran,  
memberikan pemahaman  
terkait hak untuk menjadi  
mampu dan memotivasi  
mereka agar keluar dari  
kemiskinan, biasanya tahap ini  
dilakukan dengan  
pendampingan.
2. Tahap pengkapasitasan,  
memampukan masyarakat  
kurang mampu agar memiliki  
ketrampilan untuk mengambil  
peluang yang diberikan dengan  
melakukan pelatihan –  
pelatihan, dan kegiatan yang  
memiliki tujuan meningkatkan  
*lifeskill*.
3. Tahap Pendayaan, tahap  
dimana masyarakat diberi  
peluang sesuai kemampuan

melalui partisipasi aktif dan  
berkelanjutan dengan  
memberikan peran yang lebih  
besar pada masyarakat sesuai  
kapasitas dan kapabilitas serta  
akomodasi aspirasi dan  
dipandu untuk melakukan  
evaluasi diri terhadap hasil  
pelaksanaan pilihan  
sebelumnya.

#### **E. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis  
menggunakan desain penelitian  
dengan pendekatan deskriptif  
kualitatif dengan teknik analisis  
taksonomi. Penelitian ini berlokasi  
di Kelurahan Pedurungan Kidul  
Kota Semarang dengan subjek  
penelitian yakni informan, yang  
bertugas sebagai key informan.  
Jenis data yang digunakan dalam  
penelitian ini adalah kata-kata,  
sumber tertulis, dan foto. Sumber  
data dalam penelitian ini adalah  
berbentuk data primer dan data  
sekunder, dengan menggunakan

teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **PEMBAHASAN**

### **Proses Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu di Kelurahan Pedurungan Kidul Kota Semarang**

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menjadikan masyarakat yang semula memiliki posisi terbelakang dan tidak berdaya menjadi lebih berdaya dan mandiri. Dimana dalam melakukan pemberdayaan melakukan berbagai proses yang harus dilalui yaitu :

#### **1. Tahap penyadaran**

Upaya penyadaran memberikan pemahaman terkait hak untuk menjadi mampu dan memotivasi mereka agar keluar dari kemiskinan. Upaya penyadaran yang dilakukan yaitu dengan melakukan motivasi, dengan mensosialisasikan, musyawarah dan pembinaan pentingnya mengelola sampah yang dapat bernilai jual. Dan upaya penyadaran yang selanjutnya yaitu pemberian sosialisasi, musyawarah mengenai pemilahan

sampah, pentingnya berperilaku hidup sehat dan peningkatan keterampilan dalam membuat kerajinan olahan sampah anorganik dan olahan sampah organik.

#### **2. Tahap pengkapasitasan**

Tahap pengkapasitasan, tahap memampukan masyarakat kurang mampu agar memiliki ketrampilan untuk mengambil peluang yang diberikan dengan melakukan pelatihan – pelatihan, dan kegiatan yang memiliki tujuan meningkatkan *lifeskill*. Upaya pengkapasitasan yang dilakukan yaitu dengan melakukan pelatihan pemanfaatan pengolahan sampah organik (pupuk bokashi) dan pengolahan sampah anorganik yang dibuat kerajinan tangan (seperti bungkus plastik shampoo, minyak goreng, minuman sachet) dengan melibatkan ibu-ibu, Karangtaruna, dan masyarakat di Kelurahan Pedurungan Kidul yang bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomis yaitu Souvenir dan Pupuk Bokashi.

#### **3. Tahap pendayaan**

Tahap dimana masyarakat diberi peluang sesuai kemampuan melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan

dengan memberikan peran yang lebih besar pada masyarakat sesuai kapasitas dan kapabilitas. Upaya pemberdayaan yang dilakukan dalam tahap pendayaan yaitu fasilitator dengan memberikan bantuan sumberdaya untuk berpartisipasi aktif dalam pembuatan kerajinan tangan olahan sampah anorganik dan sampah organik (pupuk bokashi).

## **KESIMPULAN**

Program pemberdayaan masyarakat sekarang ini di Indonesia masih sangat dibutuhkan. Dengan adanya Program Pemberdayaan Masyarakat diharapkan masyarakat menjadi lebih mandiri. Selain itu program pemberdayaan harus sesuai dengan wilayah yang akan dijalankan program pemberdayaan tersebut.

Pedurungan Kidul merupakan wilayah yang padat penduduk sehingga sampah yang dihasilkan terus meningkat setiap harinya. Untuk mengatasi permasalahan sampah yang menumpuk di TPS maka diperlukan sebuah program pengelolaan sampah melalui Bank

Sampah. Maka dari itu didirikanlah Bank Sampah KSM RAOS\_EMI untuk menggerakkan masyarakat agar keluar dalam keterbelakangan.

Bank Sampah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) RAOS\_EMI adalah salah satu dari penggerak dari pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu di Kelurahan Pedurungan Kidul. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu yang ada di Kelurahan Pedurungan Kidul dilaksanakan dengan 3 tahap pemberdayaan yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan yaitu :

### **1. Penyadaran**

Upaya penyadaran dalam proses pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sampah terpadu di Kelurahan Pedurungan Kidul Kota Semarang yaitu: fasilitator di bidang pendampingan dan motivasi.

### **2. Pengkapasitasan**

Upaya pada tahap pengkapasitasan dalam proses

pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sampah terpadu di Kelurahan Pedurungan Kidul Kota Semarang yaitu dengan pembimbingan.

### 3. Pendayaan

Upaya pada tahap pendayaan dalam proses pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sampah terpadu di Kelurahan Pedurungan Kidul Kota Semarang yaitu dengan fasilitator.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Adnyana, I. P. C. P. and Mohktar, M. S. (2019) 'Peran Stakeholder Dalam Pemberdayaan Petani Tebu Di Kabupaten Dompu Provinsi Ntb', *SOCA: Jurnal Sosial, Ekonomi Pertanian*, 13(1), p. 14. doi: 10.24843/soca.2019.v13.i01.p02.

Arifudin, Nasrul, B. and Maswadi (2013) 'Program of Community Empowerment Prevents Forest Fires in Indonesian Peat Land', *Procedia Environmental Sciences*. Elsevier BV, 17, pp. 129–134. doi: 10.1016/j.proenv.2013.02.020

## DAFTAR PUSTAKA

A., N. F., Raharjo, S. T. and Wibowo, H. (2017) 'PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA WISATA CIBURIAL KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG', *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*. Universitas Padjadjaran, 3(2). doi: 10.24198/jppm.v3i2.13643.

Adi, I. R. (2008) *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat (Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat)*.

IZZAH, H. S. (2017) 'Peran Stakeholders Dalam Proses Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Alas Kaki Unggulan Melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) Di Kota Mojokerto', pp. 1–15.

Joshi, A. (2017) 'Legal Empowerment and Social Accountability: Complementary Strategies Toward Rights-based Development in Health?', *World Development*. Elsevier Ltd, 99, pp. 160–172. doi: 10.1016/j.worlddev.2017.07.008.

Kayat, K., Farrah, N. and Zainuddin, A. (2016) 'International Review of Management and

- Marketing Community-based Tourism Initiative in Rural Malaysia: Is It a Success?', *International Review of Management and Marketing* /, 6(S7), pp. 242–249. Available at: <http://www.econjournals.com>.
- Keban, T. Y. (2014) *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kencana Syafiie, I. (2006) *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Manik (2003) *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambat.
- Mardikanto, T. and Soebianto, P. (2013) *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mardikanto, T. and Soebianto, P. (2017) *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung.
- Moleong (2017) *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sampah Studi Kasus di Bank Sampah Pelita Harapan, P., Ballaparang, K. and Rappocini, K. (2015) 'Pemberdayaan Masyarakat Melalui', 1 No.1.
- Sucipto, C. (2012) *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*. Yogyakarta: Goysen.
- Sugiyono (2015) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, A. T. (2004) *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumaryadi, I. N. (2005) *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Sunartiningsih, A. (2002) *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Wrihatnolo, R. R. and Dwijowijoto, R. N. (2007) *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Peraturan :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

Dokumen :

Monografi Kelurahan Pedurungan  
Kidul Bulan September 2019

Profil Potensi dan Perkembangan  
Kelurahan Pedurungan Kidul  
Kecamatan Pedurungan Tahun 2018

Buku Profil Masyarakat ( KSM )  
Raos\_Emi yang ada di Kelurahan  
Pedurungan Kidul Kota Semarang.